

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam Negara yang masih dalam fase berkembang sehingga memiliki banyak sekali hambatan dan tantangan untuk mencapai pertumbuhan serta pembangunan ekonomi yang ditargetkan. Pembangunan ekonomi yang direncanakan merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, stabilisasi harga, kesempatan kerja yang rendah, neraca pembayaran tidak imbang, serta tingkat kesejahteraan yang rendah. Tercantum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 bahwa permasalahan utama yang terjadi pada setiap provinsi salah satunya adalah angka kriminalitas yang masih tinggi, penyebab yang membuat terjadinya masyarakat banyak melakukan kriminalitas adalah faktor ekonomi yakni pengangguran yang angkanya masih tinggi pula.

Pengangguran merupakan kondisi seseorang yang memasuki usia kerja dan berupaya untuk memperoleh kerja namun belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak termasuk pengangguran. Aspek utama yang menimbulkan terbentuknya pengangguran merupakan minimnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi benda serta jasa dengan itikad mendapatkan keuntungan, hendak namun keuntungan tersebut hendak diperoleh apabila pengusaha tersebut bisa menjual benda serta jasa yang mereka penciptaan.

Terus menjadi besar permintaan, terus menjadi besar pula benda serta jasa yang mereka wujudkan. Peningkatan penciptaan yang dicoba hendak menaikkan pemakaian tenaga kerja (Sukirno, 1994).

Seseorang disebut sebagai pengangguran terbuka karena sedang mencari pekerjaan sebab tidak mempunyai pekerjaan, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan serta mencari pekerjaan, orang yang tidak memiliki pekerjaan serta mempersiapkan usaha, seseorang yang tidak memiliki kerjaan serta tidak mencari pekerjaan, sebab tidak bisa memperoleh pekerjaan, serta orang yang telah memiliki pekerjaan, namun belum mulai bekerja (-, Badan Pusat Statistik, 2020).

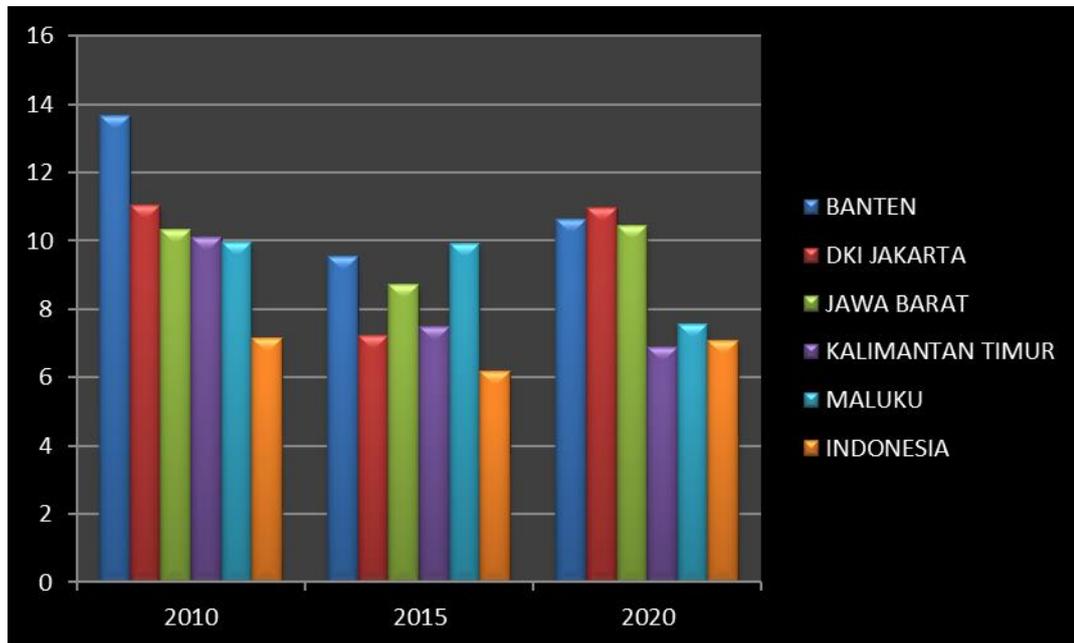
Bersumber pada informasi Badan Pusat Statistik menampilkan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Pada tahun 2018 264.161 jiwa hingga pada tahun 2020 naik sebesar 269.603 jiwa. Peningkatan tersebut pula diiringi oleh peningkatan jumlah pengangguran, perihal ini menampilkan peningkatan jumlah penduduk tidak terserap ke lapangan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran juga naik.

Tingginya tingkat pengangguran di sesuatu perekonomian daerah ataupun negara berakibat negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi negara ataupun daerah tersebut. Tingkat pengangguran akan menyebabkan berkurangnya daya beli dari masyarakat serta memperlemah permintaan barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh sektor riil yang berdampak pada bertambahnya peningkatan pengangguran susulan. Kemunduran zona riil yang selalu hendak menyebabkan depresi perekonomian ini bisa menimbulkan terjadinya tekanan mental

perekonomian. Oleh sebab itu suatu negara ataupun daerah berupaya menekan kan peningkatan pengangguran terbuka yang terjalin di negara ataupun daerah.

Problem mengenai masyarakat yang menganggur merupakan sebuah persoalan yang serius dan membutuhkan upaya yang ekstra bagi sebuah negara yang mempunyai banyak penduduk, contohnya di Negara Indonesia, dimana penambahan jumlah penduduk mengakibatkan tingginya angka angkatan kerja. Selanjutnya berarti banyak masyarakat atau angka masyarakat yang sedang mencari pekerjaan akan meningkat pula dari waktu ke waktu seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Oleh karena itu terdapat kemungkinan adanya kenaikan tingkat pengangguran jika sedikit sekali kesempatan pekerjaan yang tersedia sementara golongan angka siap kerja semakin bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa di Indonesia pengangguran terbuka tahun 2010 bulan Agustus sebesar 7,14%, tahun 2015 sebesar 6,18% dan tahun 2020 sebesar 7,07%. Angka tersebut merupakan angka rata-rata tingkat pengangguran dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tabel 1.1 memperlihatkan angka jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada setiap provinsi tahun 2010, 2015 dan 2020.



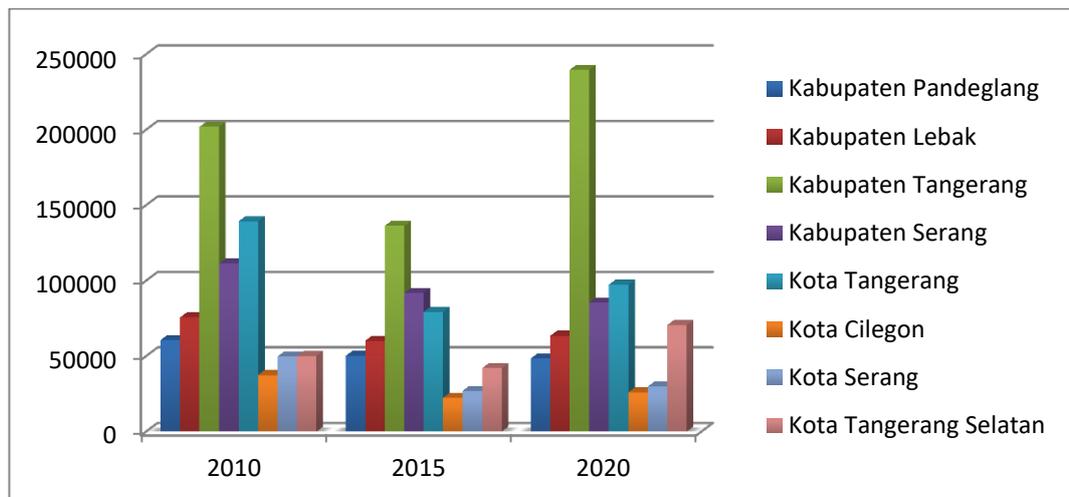
Sumber : BPS, TPT Menurut Provinsi di Indonesia

Gambar 1.1

Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi Di Indonesia

Per Bulan Agustus (Persen)

Berdasarkan data yang terlihat pada gambar 1.1. Angka pengangguran terbuka tertinggi dengan besaran 13,68 % pada tahun 2010 diduduki oleh Provinsi Banten. Selanjutnya pada tahun 2015 Provinsi Banten merupakan tingkat pengangguran terbuka kedua paling tinggi setelah Maluku dengan besaran 9,55%. Dan pada tahun 2020 angka pengangguran terbuka tertinggi dengan besaran 10,95% diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan Provinsi Banten selama dari tahun 2010 dan tahun 2015 tergolong paling tertinggal dalam menanggulangi persoalan pengangguran di Indonesia.



Sumber: BPS Provinsi Banten

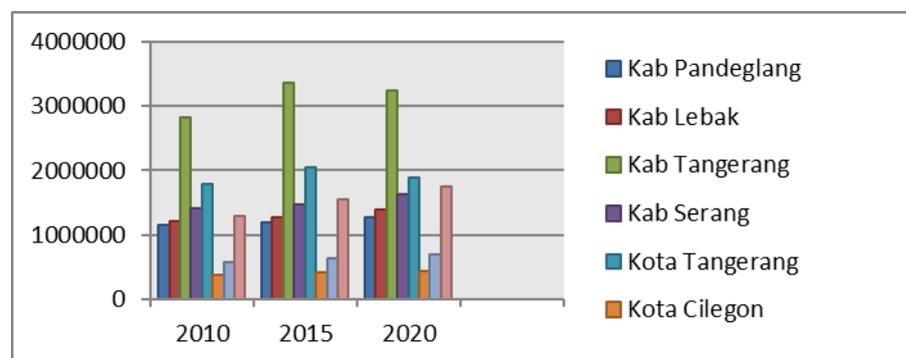
Gambar 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Per Bulan Agustus (Jiwa)

Gambar 1.2 memperlihatkan variasi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Angka pengangguran tertinggi per bulan Agustus pada tahun 2010 adalah Kabupaten Tangerang sebesar 201.956 Jiwa dan mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 136277 Jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 239.788 Jiwa. Bervariasinya tingkat pengangguran di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sangat erat dengan kekuatan sosial di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut, dan secara agregat berpengaruh pada angka pengangguran di Banten.

Dengan tingginya angka penduduk yang menganggur di Banten sudah semestinya ada penekanan terhadap upaya mengatasi pengangguran. Upaya menekan angka pengangguran terbuka perlu dipelajari lebih lanjut apa saja faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran, dengan demikian kebijakan

yang efektif dapat dirumuskan dalam mengatasi masalah tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Faktor yang dianggap dapat memberikan pengaruh kepada angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten adalah tenaga kerja pada sektor industri, kuantitas jumlah penduduk, upah minimum Kabupaten/Kota, serta pertumbuhan ekonomi.

Banten merupakan daerah berkembang seperti daerah lain, Banten setiap tahunnya selalu mengalami penambahan angka kuantitas penduduk. Peningkatan kuantitas penduduk akan membawa dampak pada pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Kabupaten Tangerang Banten pada tahun 2020 penduduknya berjumlah 3.245.619 jiwa.



Sumber : BPS Provinsi Banten Jumlah Penduduk Kab/Kota

Gambar 1.3

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten (Jiwa)

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berdasarkan data Badan Pusat Statistika 2010, 2015 dan 2020 yang digambarkan pada Gambar 1.3 jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Banten adalah Kabupaten Tangerang. Sehingga Provinsi Banten tahun 2010, 2015 dan 2020 angka pengangguran akan semakin meningkat.

Peningkatan jumlah penduduk yang terus menerus akan menyebabkan bertambahnya usia golongan kerja di Provinsi Banten. Tumbuhnya usia golongan kerja tanpa diiringi jumlah kesempatan pekerjaan akan mengakibatkan pengangguran (-, Badan Pusat Statistik, 2020).

Riza Firdhania dan Fivien Muslihatinningsih (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kaunitas penduduk di Kabupaten Jember terus meningkat, meningkatnya kuantitas penduduk di Kabupaten Jember ini menyebabkan permasalahan yakni masyarakat yang menganggur bertambah di Kabupaten Jember.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa terjadinya fenomena pengangguran disebabkan oleh tidak seimbang antara jumlah kesempatan kerja dengan jumlah golongan usia kerja. Sehingga usia golongan kerja yang membutuhkan pekerjaan tidak didukung oleh jumlah kesempatan kerja yang banyak. Di Provinsi Banten, peningkatan kesempatan kerja dapat dilakukan melalui sektor industri karena faktor industri merupakan sektor dasar di Banten. Hal demikian tercermin dari total pendapatan daerah Provinsi Banten yang didominasi oleh sektor industri.

Usaha yang bergerak dalam bidang produksi atau menghasilkan produk tertentu, atau menyediakan jasa seperti transportasi yang membutuhkan modal serta tenaga kerja yang relatif besar merupakan sebuah sebuat bagi perusahaan sektor industri (Winardi, 1998).

Salah satu indikator dalam mendukung pembangunan ekonomi adalah dengan melihat angka pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita sebagian besar

didominasi oleh masyarakat yang bergerak di bidang sektor industri. Oleh sebab itu, industrialisasi selalu menjadi salah satu gerbang utama dalam mengupayakan pembangunan ekonomi. Tolak ukur utama dalam melihat peran industri kepada pembangunan adalah dengan menilai kontribusi sektor produksi manufaktur terhadap PDB, banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri, serta sumbangan komoditas barang dan jasa dari sektor industri yang bisa di ekspor.

Tabel 1.1

PDRB ADHK Kategori Lapangan Usaha Provinsi Banten (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHK Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Banten		
	2010	2015	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.737	20.743	25.275
B. Pertambangan dan Penggalian	2.614	2.775	2.641
C. Industri Pengolahan	107.807	134.907	147.517
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.044	4.338	3.832
E. Pengadaan Air	28.568	34.629	47.059
F. Konstruksi	21.686	34.154	44.727
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34.422	49.575	60.482
H. Transportasi dan Pergudangan	16.257	23.349	20.883
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.185	8.52	1.086
J. Informasi dan Komunikasi	11.246	19.783	29.736
K. Jasa Keuangan	6.649	10.137	13.492
L. Real Estate	20.529	29.688	41.392
M,N. Jasa Perusahaan	2.47	3.607	4.627
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.984	6.362	8.057
P. Jasa Pendidikan	8.229	10.648	14.299
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.385	4.229	6.126
R,S,T,U. Jasa lainnya	3.933	5.216	6.717
PDRB	271.465	368.377	441.139

Sumber : BPS Banten PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kategori Lapangan Usaha

Berdasarkan tabel 1.1, di Provinsi Banten yang tertinggi adalah sektor industri. Sektor industri Banten menduduki urutan pertama terhadap PDRB harga konstan yang paling tinggi dengan besaran 107.807 Milyar Rupiah pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2015 Provinsi Banten merupakan sektor industri paling tinggi dengan besaran 134.907 Milyar Rupiah. Dan pada tahun 2020 Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki sektor industri menduduki

urutan pertama terhadap PDRB atas dasar harga konstan paling tinggi dengan besaran 441.139. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi Banten lapangan usaha sektor industri merupakan lapangan usaha paling tinggi.

Tabel 1.2
Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Dan Sedang
Menurut Kab/Kota Provinsi Banten (Jiwa)

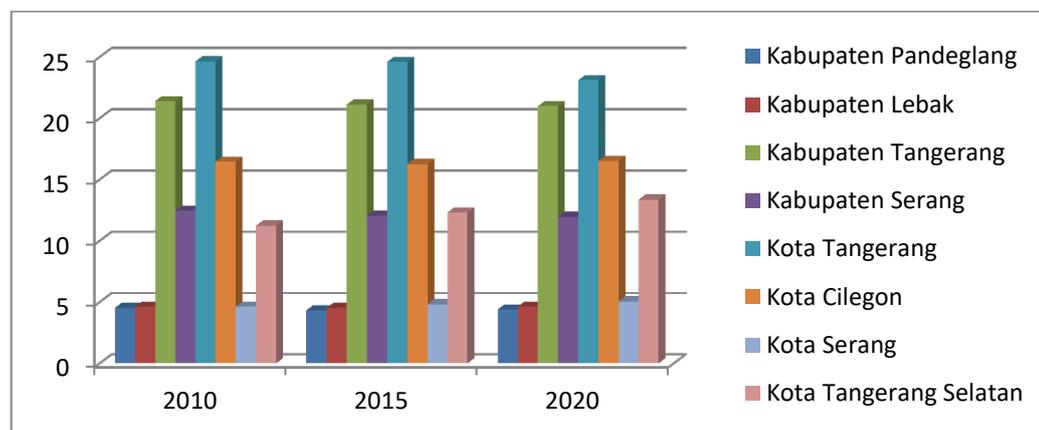
Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja IBS		
	2010	2015	2020
Kab Pandeglang	1.241	734	991
Kab Lebak	2.693	1.493	12.589
Kab Tangerang	176.755	179.000	556.225
Kab Serang	6.4267	80.723	171.527
Kota Tangerang	183.551	193.602	436.922
Kota Cilegon	19.37	20.323	50.441
Kota Serang	951	1.008	3.501
Kota Tangerang Selatan	28.274	28.225	46.109

Sumber : BPS Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang

Dari tabel 1.2 memperlihatkan jumlah tenaga kerja sektor industri di Kab/Kota Provinsi Banten. Penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Kabupaten Tangerang terus meningkat tiap tahun dari 176.755 Jiwa menjadi 556.225 Jiwa.

Nurhayati (2012) menyatakan dalam penelitiannya, di Kecamatan Payung Sekaki terdapat peningkatan pada daya serap tenaga kerja. Sehingga dengan begitu, angka pengangguran di Kota Pekanbaru akan berkurang sebab terbantu oleh jumlah daya serap angkatan kerja di salah satu kecamatannya yakni Payung Sekaki.

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator yang penting dalam menilai keberhasilan suatu perekonomian. Perekonomian yang berkembang dilihat dari tingginya angka kegiatan ekonomi dari yang sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pula merupakan sebuah pijakan utama dalam menciptakan kesejahteraan penduduk, sehingga negara atau wilayah tersebut dapat menanggulangi masalah perekonomiannya, antara lain masalah pengangguran (Kuncoro, 2013).



Sumber : BPS Provinsi Banten PDRB ADHK (data diolah)

Gambar 1.4

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten (Persen)

Gambar 1.4 menunjukkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota Provinsi Banten tahun 2010 terjadi peningkatan di Kota Tangerang sebesar 24.65%. Sedangkan tahun 2015 Kota Tangerang tetap unggul di peringkat pertama meskipun turun menjadi 24.60%. Dan di tahun 2020 Kota Tangerang tetap unggul walaupun dengan persentase yang menurun menjadi 23.10%.

Artinya pertumbuhan ekonomi ini tergolong cukup tinggi terhadap tingkat pengangguran di Kab/Kota Provinsi Banten.

Monica Wulandari (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatra Barat. Artinya semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan semakin menurun.

Pengangguran juga disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai UMR/UMK. Tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka pengangguran, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal tersebut dikarenakan upah merupakan kompensasi yang dibebankan kepada perusahaan kepada karyawan. Tingginya upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan, akan menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan sementara tingginya angka tenaga kerja membutuhkan kesempatan kerja tersebut (Mankiw, 2000).

Tabel 1.3

Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kab/Kota		
	2010	2015	2020
Kab Pandeglang	964.500	1.737.000	2.758.909
Kab Lebak	959.500	1.728.000	2.710.654
Kab Tangerang	1.117.245	2.710.000	4.168.268
Kab Serang	1.101.000	2.700.000	5.152.887
Kota Tangerang	1.118.009	2.730.000	4.199.029
Kota Cilegon	1.174.000	2.760.590	4.246.081
Kota Serang	1.050.000	2.375.000	3.773.940
Kota Tangerang Selatan	-	2.710.000	4.168.268
Provinsi Banten	955.300	1.600.000	2.460.996

Sumber : BPS UMK Provinsi Banten

Tabel 1.3 dapat dijelaskan terdapat peningkatan dalam nominal UMK Provinsi Banten tahun 2010, 2015, 2020. Namun, nominal angka UMK yang meningkat rupanya tidak dapat menopang tingginya angka pengangguran dari tahun 2010, 2015 dan 2020 yang masih terbilang cukup tinggi.

Jihad Lukis dan Daryono Soebagiyo (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengangguran dan upah minimum yang diberikan perusahaan memiliki arah hubungan yang positif. Artinya ketika upah minimum mengalami angka yang tinggi atau naik, maka akan terjadi peningkatan pula pada pengangguran. Salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran meningkat dikarenakan upah adalah karena adanya *wage rigidity* atau upah yang tidak mampu menyesuaikan pada titik ekuilibrium yang apabila kesempatan kerja sama dengan jumlah angka angkatan kerja.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari penggunaan data. Penelitian ini menggunakan data Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010, 2015 dan 2020. Terdapat hasil yang serupa pada beberapa penelitian terdahulu bahwa adanya pengaruh tingkat pengangguran, meskipun terdapat pula beberapa penelitian terdahulu yang lain yang memiliki hasil penelitian tidak adanya pengaruh terhadap pengangguran. Sehingga dengan demikian, peneliti mendapatkan hasil yang serupa sebab data terdahulu banyak tersedia dari penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan empat faktor yang digabung yang dianggap dapat mendorong angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Penjelasan di atas menunjukkan adanya fenomena fluktuatif mengenai angka pengangguran di delapan Kab/Kota Provinsi Banten. Hal tersebut dapat dikatakan

bahwa penyebab utamanya adalah masih belum merata upaya kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian berkala tentang apa saja faktor-faktor yang dapat berpengaruh kepada angka pengangguran khususnya di delapan Kab/Kota Provinsi Banten. Dengan demikian, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Inudstri Besar Sedang Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2010-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelesan sebelumnya pada latar belakang, maka permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, upah minimum Kabupaten/Kota dan jumlah tenaga kerja industri besar sedang Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2010-2020?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, upah minimum Kab/Kota dan jumlah tenaga kerja industri besar sedang terhadap tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2010-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada penjelesan sebelumnya pada latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang, jumlah tenaga kerja industri besar sedang, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2010-2020.
2. Menguji pengaruh jumlah tenaga kerja industri besar sedang, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan upah minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2010-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada penjelesan sebelumnya pada latar belakang, maka manfaat dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Penelitian ini sekiranya mampu berkontribusi dalam upaya pembelajaran khususnya ilmu pengetahuan, yakni:
 - Menjelaskan dengan fakta empiris mengenai kondisi jumlah tenaga kerja sektor industri besar sedang, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan upah minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,
- b. Untuk menjadi sumber informasi bagi pengembangan judul penelitian ini dengan pengembangan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik penelitian ini dapat bermanfaat :

a. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran, menentukan jumlah tenaga kerja sektor industri besar sedang, upah minimum kabupaten atau kota, serta permasalahan penduduk di Provinsi Banten.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

c. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan menurunkan angka pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Selain itu peneliti juga dapat menjadi bahan informasi dan pengalaman dalam penyusunan penelitian ini.